

**STRATEGI INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DINAS KESEHATAN
KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Ibnu Madani Pranata

NPP. 29.0400

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Fakultas Manajemen Pemerintahan

Email: Pranataibnu52@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): This thesis is entitled "Strategies for Supervision of the Inspectorate on the Procurement of Goods and Services in Handling COVID-19 at the Prabumulih City Health Office". **Purposae:** The purpose of this research is to find out the Inspectorate's supervision strategy over the procurement of goods and services in handling COVID-19, to see the obstacles to the Inspectorate's supervision of the procurement of goods and services in handling COVID-19, and to assist the government in determining efforts to overcome the obstacles to the Inspectorate's supervision of procurement. goods and services in handling COVID-19. **Method:** The research method used in this research is descriptive qualitative research method with an inductive approach. The reason why this method and approach was chosen was because it was based on various considerations and was flexible and adapted to the context intended to give the author an opportunity to adapt to the conditions in the field. **Result:** The results of the study indicate that the Inspectorate's supervision of the procurement of goods and services in handling COVID-19 at the health office has been effective, this is based on the fact that every indicator of the theory of effectiveness of supervision according to the study has been going well. However, in its implementation there are still obstacles such as delays in supervision carried out by the Inspectorate due to not using e-catalogs, minimal availability of goods, and difficulty in drawing up estimates of the need for goods. However, the government has made efforts in the form of more intense communication, cooperation with other parties, and inspection of distributed documents. **Conclusion/sugegestion:** The researcher concludes in this study that the supervision carried out by the Prabumulih City Inspectorate on the procurement of goods and services in handling COVID-19 at the Prabumulih City Health Office can be said to have run well and effectively. **Keyword:** *Strategy, Supervision, Procurement of Goods and Services, COVID-19*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Skripsi ini berjudul “Strategi Pengawasan Inspektorat atas Pengadaan Barang Dan Jasa dalam Penanganan COVID-19 pada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih”. Penelitian ini untuk mengetahui strategi pengawasan Inspektorat atas pengadaan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19 pada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih. **Tujuan:** Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengawasan Inspektorat atas pengadaan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19, melihat hambatan pengawasan Inspektorat atas pengadaan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19, dan membantu pemerintah guna menentukan upaya dalam mengatasi hambatan pengawasan Inspektorat atas pengadaan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan induktif. Alasan mengapa metode dan pendekatan ini dipilih adalah karena atas berbagai pertimbangan dan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan konteks yang dimaksudkan agar ada kesempatan penulis untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di lapangan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat atas pengadaan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19 pada dinas kesehatan sudah efektif, hal ini didasari karena setiap indikator dari teori efektivitas pengawasan menurut sutedi sudah berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya tetap adanya hambatan seperti keterlambatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dikarenakan tidak menggunakan e-Katalog, ketersediaan barang yang minim, dan sulitnya Menyusun estimasi kebutuhan barang. Namun hambatan tersebut pemerintah sudah melakukan upaya berupa komunikasi yang lebih inten, kerja sama dengan pihak lain, dan pemeriksaan dokumen didistributor. **Kesimpulan dan Saran:** Peneliti menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Prabumulih atas pengadaan barang dan jasa dalam penanganan covid-19 pada dinas kesehatan kota prabumulih dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan efektif. **Kata Kunci:** Strategi, Pengawasan, Pengadaan Barang dan Jasa, COVID-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang luas, memiliki luas 1,905 jutakm² terbagi ke dalam 34 provinsi, di dalam provinsi terbagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Dengan luasnya wilayah Indonesia membuat pemerintahan pusat mengalami kesulitan dalam mengatur daerah-daerah, untuk mengatasinya maka lahirlah istilah dekonsentrasi dan desentralisasi, tujuannya untuk menyerahkan sebagian tugas-tugas pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah dengan tetap terkoordinasi dengan pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pengadaan barang dan jasa diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pemerintah daerah sebagai penggerak roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa menjadi sangat penting. Selain itu pemerintah daerah juga harus memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang nantinya digunakan sebagai fasilitas penunjang dalam menjalankan pemerintahannya, untuk mensejahterahkan rakyatnya. Prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Berdasarkan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa metode pemilihan penyedia barang pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas: E-purchasing; Pengadaan langsung; penunjukan langsung; tender cepat; dan Tender. E-purchasing, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Sedangkan pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu Menurut Tuanakotta (2010:431), pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun, BPK dan BPKP melaporkan kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Dibuktikan dengan adanya pemberitaan di media elektronik dan media cetak yang mengungkap kasus kecurangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang marak dilakukan oleh oknum pejabat negara. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penambahan anggaran terhadap dinas kesehatan sebagai garis terdepan dalam menangani pandemic covid-19 yang terjadi. Tentunya inspektora sebagai pengawas memiliki peranan penting dalam menjalankan tugasnya seperti pada pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan covid-19 yang dimana terlibatnya pihak ketiga dikarenakan pada pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem pelelangan, hal tersebut dilakkan pemerintah karena covid-19 merupakan kasus baru dan tidak ada anggaran awal dari pemerintah untuk menanganani hal tersebut. selain itu, juga adanya kekhawatiran kepada pihak ketiga untuk merealisasikan anggaran yang sudah disediakan, karena belum tersedianya patokan harga awal

atau *e-catalog* yang ada untuk kasus tersebut menyebabkan dalam pelaksanaannya akan sulit untuk menemukan adanya kecurangan atau kegagalan dalam proses pelelangan. Selain itu juga permasalahan lain seperti kurang tersedianya barang yang harus disediakan oleh penyedia barang karena kurangnya pasokan untuk penanganan covid-19 tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kebijakan dalam merumuskan suatu kebijakan dimana kebijakan sangat dibutuhkan untuk dapat mengatur dalam menjalankan kegiatan yang ada di masyarakat sehari-hari. Penelitian oleh Muthia Tri Ardianty,(2016) terdapat persamaan yang dimana membahas peranan inspektorat sebagai pengawas dalam barang dan jasa dan pada penelitian yang saya tulis memiliki perbedaan dimana pada penelitian ini saya membahas tentang peran inspektorat sebagai pengawas pada pengadaan barang dan jasa di dinas kesehatan untuk penanganan COVID-19. Penelitian oleh Sbastianus Sabar,(2018) terdapat persamaan yang dimana membahas peranan inspektorat sebagai pengawas di dinas kesehatan dan pada penelitian yang saya buat terdapat perbedaan yaitu membahas tentang peranan inspektorat sebagai pengawas pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Penelitian oleh Glory Augusta Elisabeth Mangaranap Sianipar,(2020) terdapat persamaan yang dimana membahas peran pengawasan yang dilakukan inspektorat pada masa pandemic COVID-19 sebagai pengawas internal yang ada didalam pemerintahan, perbedaan yang ada pada penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian ini lebih membahas ke peranan inspektorat sebagai pengawas pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19 Di dinas kesehatan.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukannya yaitu Strategi Inspektorat daerah dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19 di dinas kesehatan kota prabumulih provinsi sumatera selatan, metode yang digunakan menggunakan metode adalah metode penelitian kualitatif. Metode Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan induktif. Alasan mengapa metode dan pendekatan ini dipilih adalah karena atas berbagai pertimbangan dan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan konteks yang dimaksudkan agar ada kesempatan penulis untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di lapangan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembelajaran daring di kota Palembang studi di sekolah menengah pertama negeri 33 kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode penelitian deskriptif menurut Sugiono (2016:53) definisi penelitian deskriptif adalah sebagai berikut: “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variable sendiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain”. Pendekatan yang digunakan dalam magang ini adalah pendekatan induktif. Selanjutnya menurut Sugiyono (2006:12) mengemukakan bahwa “Pendekatan Induktif adalah metode berpikir dimana kesimpulan diperoleh dari hasil induksi (memeriksa atau mengumpulkan fakta-fakta empiris) kemudian ditarik generalisasi yang berupa sifat umum”. Jadi pendekatan Induktif adalah suatu pendekatan yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti yang akhirnya ditemui penyelesaian masalah yang bersifat umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa dalam penanganan covid-19 di kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan.

1. Analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal

Pada analisis internal membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*) dalam Inspektorat Daerah Kota Prabumulih. Sedangkan pada analisis eksternal membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dalam Inspektorat Daerah Kota Prabumulih. Penulis melakukan survei di lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif dimana teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi dan observasi serta mengamati dokumen sekunder berdasarkan Rencana Kinerja Pemerintah daerah Kota Prabumulih tahun anggaran 2021, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Prabumulih, serta berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan yang dianggap bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Adapun faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari Inspektorat Daerah Kota Prabumulih antara lain:

a. Kekuatan (Stranger)

Setelah melakukan penelitian, Peneliti merangkum dan menghimpun berbagai macam informasi dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber dan observasi partisipatif dimana peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas pada Inspektorat Daerah Kota Prabumulih, Sehingga penulis menguraikan kekuatan (*strenght*) yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Prabumulih antara lain:

1. Adanya kebijakan pemerintah yang melandasi dasar kinerja mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing aparaturnya yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Prabumulih No 76 Tahun 2020 tentang susunan organisasi, tugas fungsi Inspektorat daerah Kota Prabumulih, sehingga

memberikan kejelasan kepada masing-masing aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak terjadi kemungkinan tumpang tindih antar jabatan.

2. Alat pengawasan yaitu sistem pengendalian manajemen sudah sangat baik, dengan memakai peraturan-peraturan yang dapat menjadi patokan dari pelaksanaan pengawasan Pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan *COVID-19* di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.
3. Adanya komitmen dari pimpinan dan kepala daerah dalam menindak lanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah atas Hasil audit tujuan tertentu pengadaan barang/jasa pemerintah untuk penanganan covid-19 yang bersumber dari APBD di Pemerintah Kota Prabumulih.

b. Kelemahan (Weakness)

Analisis kelemahan membahas tentang hal-hal yang menjadifaktor penghambat dalam suatu instansi atau organisasi dalam melaksanakan program kerja dan tercapainya tujuan umum Inspektorat Daerah Kota Prabumulih. Setelah melakukan observasi dan wawancara di lapangan peneliti menganalisis beberapa faktor kelemahan yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Ketersediaa Anggaran yang di gunakan untuk melakukan pengawasan inspektorat di alihkan karena adanya reconfusing anggaran sehingga kegiatan yang di lakukan terkendala
2. Kurangnya Kuantitas sumber daya aparatur dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia dengan latar belakang yang sesuai sudah memadai untuk melakukan pemeriksaan/Auditor terhadap pengadaan barang dan jasa di Dinas kesehatan Kota Prabumulih yang akan dilakukan untuk penanganan covid-19.

c. Peluang (Opportunities)

Dari hasil penelitian yang telah dilakuan terdapat beberapa faktor yang menjadi peluang Inspektorat Daerah Kota Prabumuli dalam Pengawasan Pengadan barang dan jasa pada masa covid 19 di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih yaitu sebagai berikut :

1. Adanya bimtek oleh BPK untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan bidang tugas dan fungsi termasuk dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa.
2. Adanya komitmen dan kerjasama Inspektorat Daerah Kota Prabumulih untuk membangun komunikasi yang intens dengan dinas Kesehatan Kota Prabumulih pada proses pengadaan barang dan jasa.

d. Ancaman (Threats)

Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan dengan perangkat Inspektorat Daerah Kota Prabumulih, peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi ancaman diantaranya :

1. Dalam pengawasannya Inspektorat terlambat akibat kekhawatiran terhadap pihak ketiga dalam merealisasikan anggaran. Hal ini disebabkan tidak adanya pematokan harga yang standar pasaran atau tidak adanya *e-katalog*.
2. pengadaan barang dan jasa ini pihak ketiga selaku pemakai anggaran tidak perlu memakai *e-Katalog* dalam merealisasikan anggarannya dikarenakan keadaan yang sedang darurat akibat pandemi *COVID-19*.
3. ketersediaan barang untuk penanganan *COVID-19* sangat susah didapat akibat minimnya produksi barang yang akan didistribusikan Estimasi kebutuhan barang dalam penanganan *COVID-19* ini bisa dikatakan hampir tidak mungkin bisa disusun.

3. Matriks Analisis SWOT

a. Strategi S-O

Merupakan situasi yang menguntungkan bagi Inspektorat Daerah Kota Prabumulih dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, faktor-faktor lingkungan internal yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Prabumulih sebagai rumusan dalam mencocokkan isi kekuatan dengan peluang tersebut maka didapat strategis bagi Inspektorat Daerah Kota Prabumulih dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19 di dinas kesehatan kota prabumulih antara lain :

1. Mensosialisasikan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19
2. Kegiatan Mensosialisasikan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19 dilakukan kepada auditor sehingga dapat memudahkan dalam pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- 3.

b. Strategi S-T

Merupakan strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk menghindari ancaman. Maksud dari perumusan strategi S-T ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan lingkungan internal yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Prabumulih dengan mencocokkan dengan faktor eksternal yaitu faktor ancaman. Adapun isu- isu strategi yang dapat dilakukan Inspektorat Daerah Kota Prabumulih yaitu :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama Inspektorat Daerah dan pimpinan

Dinas Kesehatan Kota Prabumulih untuk membangun komunikasi yang intens pada pengadaan barang dan jasa supaya setiap pengadaan barang dan jasa bagi Tenaga Kesehatan dalam keadaan darurat dikarekan tidak tersedianya e-Katalog dalam merealisasikan anggarannya. Tanpa adanya e-Katalog dalam merealisasikan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dalam penanganan covid-19 inspektordaaerah harus melakukan komitmen dan kerja sama yang baik dengan dinas kesehatan dalam proses pengawasannya , agar tidak terjadinya temuan-temuan. Untuk penanganan covid 19 yang relevan, andal, dapat dimengerti dan dapat dipahami. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan dengan melakukam kerjasama dan koordinasi dengan pihak berkompeten seperti BPK (Badan Pengawas Keuangan).

2. Bekerja sama dengan pihak lain baik itu kabupaten tetangga atau tim gugus provinsi guna mengetahui dan dapat mengaudit dalam pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih untuk menindaklanjuti minimnya ketersediaan atas barang dan jasa untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Strategi W-O

Strategi ini diperoleh berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan. Analisis strategi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana memperoleh strategi yang mampu mengatasi kelemahan internal yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Prabumulih dalam meningkatkan dengan pengawasan pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid 19 di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dengan memanfaatkan peluang guna mencapai tujuan.

d. Strategi W-T

Strategi W-T dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana menciptakan strategi yang mampu mengatasi kelemahan untuk mengatasi ancaman lingkungan eksternal. Dengan menganalisis peluang dan hambatan maka diperoleh isu-isu strategis W-T sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan berdasarkan pengadaan barang dan jasa dikarenakan tidak memiliki e-Katalog terlebih lagi kurangnya Kuantitas sumber daya aparatur dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia dengan latar belakang yang sesuai sudah memadai dalam melakukan pemeriksaan/Auditor terhadap pengadaan barang dan jasa.
2. Memfokuskan anggaran yang ada untuk melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa guna penanganan covid-19 di karenakan ketersediaan barang untuk penanganan *COVID-19* sangat susah didapat akibat minimnya produksi

barang yang akan didistribusikan sehingga barang yang di dapat harganya tidak sama dengan pasaran.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Strategi Inspektorat daerah dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19 di dinas kesehatan kota prabumulih provinsi sumatera selatan memberikan banyak dampak positif dalam mengawasi dalam pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan pandemic covid-19 dan mampu mengawasi penggunaan anggaran yang ada pada dinas kesehatan kota prabumulih. Strategi yang diterapkan sudah berjalan dengan lancar dan merupakan salah satu bentuk preventif dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa di kota prabumulih provinsi sumatera selatan. Peneliti menemukan temuan penting yaitu pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan landar dan terlaksana dengan baik jika seluruh komponen penunjang pengadaan barang dan jasa dapat terpenuhi sehingga dinas kesehatan dapat mempercepat penanganan korban pandemic covid-19.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat kota prabumulih atas pengadaan barang dan jasa dalam penanganan covid-19 pada dinas kesehatan kota prabumulih dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan sudah bisa dikatakan efektif, hal ini dikarenakan setiap indicator dari teori efektivitas pengawasan menurut sutedi sudah berjalan dengan sangat baik dan terperinci.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi penelitian Strategi Inspektorat daerah dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Strategi Inspektorat daerah dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Adawiyah, W., & Ni'matuzahroh. (2016). *Terapi spiritual emotional freedom*
- Adiwilaga Rendy dkk.(2018).*Sistem Pemerintahan Indonesia*.Sleman: Deepublish.
- Adrian Sutedi, 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.technique (seft) untuk menurunkan tingkat stres akademikpada siswa menengah atas di pondok pesantren. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 04, 2301-8267.
- Adrian Sutedi, 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azmi Fendri . 2016 . *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah* . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Freddy Rangkuti. 2014. *ANALISIS SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Freddy Rangkuti (2016). *Teknik Membedakan Kasus Bisnis AnalisisSWOT*. Jakarta : PT Gramedia.
- Johnson, G. and Scholes, K. (2016). *Exploring Corporate Strategy-Textand Cases*. Hemel Hempstead: Prentice-Hall.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Sondang P. Siagian. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*, Bumi Aksara.
- Jakarta. Sudjana. 2008. *Metode Statistika*. Tarsito. Bandung
- Sugiyono.2006.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*.Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta
- Tuanakotta, Theodorus. M. 2010. *Akuntansi Forensik dan AuditorInvestigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI). Edisi ke 2: Jakarta.
- Wiliem Siahaya (2016:2) *Management Pengadaan (ProcurementManagemet)* Bogor

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Perpres No-12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Preseiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan Lkpp Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

